

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada**Kronik¹**

Universitas Gadjah Mada diperintahkan ke tahun 1946, saat ketika kerajaan dan kabupaten RI di hiraukan dari Jaktim ke Yogyakarta akibat incaman pemerintahan kolonial Belanda yang berusaha dengan setara Sekar yang dimotori Inggris. Sehingga bekota Republik Indonesia berada di kota Yogyakarta hingga akhir tahun 1949. Dengan keberadaan pejabat-pejabat negara berpendidikan tinggi di kota ini, semakin dimuatkan mendesaknya pengadaan pejabat negara, maka dilakukanlah pembentukan sebuah kantor pusat pendidikan dan penelitian. Dalam hal ini, penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut adalah Akademi Ilmu Politik dengan para pengajarannya terdiri dari pejabat negara ada di Yogyakarta, yang bertujuan berbagaimana lulusan akademik mereka dari negara ke seluruh nusantara yang ada di Jaktim (Jakarta) pada masa perjuangan Belanda.

Tujuan diadakannya Akademi Ilmu Politik ini adalah menyiapkan sarjana untuk mengisi jabatan-jabatan di dalam bahagian-bahagian dalam negeri, dipelihara kurang negri, dan penerangan politik di dalam daerah-daerah yang belum pemerintahan, hubungan internasional, dan publisistik di Universitas Gadjah Mada.

Bersamaan itu para sarjana yang berupaya non-kooperatif dengan kolonial Belanda, yang masih kerabali di Indonesia, juga menyelegarkan pendidikan tinggi, seperti dokter-dokter lulusan Belanda memperkuat perguruan tinggi sarjana di kota ini, sehingga terdapat sekolah tinggi teknik, dan bahkan universitas tertinggi bangsa pedidikan tinggi ini terakta dengan deparmenten Kementerian tertentu, seperti penyajian teologi terakta untuk Kementerian Penerangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dakini Negara, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan dan sebagainya.

Perubahan pertama lembaga institusi-institusi pendidikan tinggi adalah dengan diketurunkannya Peraturan Pemerintah no 23 tahun 1949 tentang "Peraturan Sementara tentang Pengembangan Perguruan Tinggi Mengaji Universitas". Pada saat itu, pendidikan tinggi yang sudah ada dengan penamaan macam seperti Akademi, Bahi Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi:

1. Kadiskiran
2. Teknikal
3. Sastra dan Filosofat
4. Pertanian
5. Sanitasi dan Hewan
6. Hukum

Ketemanan pendidikan tinggi itu yang tadinya tersebar di berbagai tempat, digabungkan menjadi fakultas-fakultas di dalam Universitas Negeri Gadjah Mada (UNG). Dengan demikian, warisan penting dari akademi RI yang diambil ke Jakarta, adalah di Yogyakarta dikukuhkan benderanya universitas pemerintah pertama di Indonesia, yaitu 19 Desember 1949.

Adapun di dalam Fakultas Hukum terdapat:

¹ Data dirangkum dari Mardiyah Muchlisah, et. al., (1980) *Buku Peringatan 50th Anniversary Universitas Gadjah Mada*, Penerbitan Pustaka Prayoga Sepurwono Abdi Pustaka Seri Ilmu Politik UGM, Yogyakarta, dan M. Dewantoro Rakusandy dkk, ed., (1999) *50 Tahun UGM : Di Sepanjang Dua Puluh Tahun* LPIES, Jakarta 1999.

1. Akademi Ilmu Politik
2. Akademi Kedinasan Hukum, Kebijakan Ekonomi dan Notaris
3. Akademi Pendidikan Guru Bagian Tatanegara, Ekonomi dan Sosiologi

Pada tahun 1950 disampaikan Peraturan Pemerintah (no 30 tahun 1950) tentang Penghapusan Bentuk Akademi dalam Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Untuk itu akademi-akademi yang ada pada Fakultas Hukum sebelumnya berhakna "tet" diubah menjadi "fit", diberi dan dikenal baru sebagai Fakultas Hukum, Sosial dan Politik (FHSP) terdiri atas:

1. Bagian Hukum
2. Bagian Sosial dan Politik.

Bagian Sosial dan Politik bersama dengan Akademi Ilmu Politik, terdiri atas:

1. Jurusan Pemerintahan
2. Jurusan Hubungan Internasional
3. Jurusan Kemasayarakatan dan Publisitik

Tahun 1951, Bagian Sosial dan Politik pada Fakultas Hukum, Sosial dan Politik, mengalami perubahan pada jurusan publisitik, sehingga sejaganya terdiri atas:

1. Jurusan Pemerintahan
2. Jurusan Hubungan Internasional
3. Jurusan Kemasayarakatan dan Publisitik

Bagian Sosial dan Politik tidak ada perubahan, yaitu:

1. Jurusan Pemerintahan
2. Jurusan Hubungan Internasional
3. Jurusan Kemasayarakatan dan Publisitik

Pada 19 September 1955, bagian-bagian pada Fakultas FHSP mendapat peningkatan status sebagai Fakultas yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, dan Fakultas Sosial dan Politik. Dengan demikian tanggal tersebutlah lahir Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (sejak saat itu pun universitas menggantikan fakultas dan universitas sejak 1954, sebutan Universitas Negeri Gadjah Mada UNGM diubah menjadi Universitas Gadjah Mada UGM).

Tahun 1957 Fakultas Sosial dan Politik dikembangkan, jurusan Kemasayarakatan dan Publisitik dihapus, kemasayarakatan dikenal jurusan Ilmu Publisistik, Sosio-ologi, dan Ilmu Sosawi, sehingga fakultas terdiri atas 5 jurusan:

1. Ilmu Usaha Negara (menganti Pemerintahan)
2. Ilmu Hubungan Internasional
3. Ilmu Publisistik (menganti nama publisitik)
4. Sosio-ologi
5. Ilmu Sosawi

Pada tahun 1964, Jurusan Pemerintahan dibidikkan kembali, dan Ilmu Usaha Negara diganti Ilmu Administrasi Negara. Sejak itu Fakultas Sosial dan Politik terdiri dari 6 jurusan, yaitu:

1. Ilmu Usaha Negara (menganti Pemerintahan)
2. Ilmu Hubungan Internasional
3. Ilmu Publisistik (menganti nama publisitik)
4. Sosio-ologi
5. Ilmu Sosawi
6. Ilmu Administrasi Negara

1. Ilmu Administrasi Negara (menggantikan nama Ilmu Usaha Negara)
2. Ilmu Hubungan Internasional
3. Ilmu Publisistik
4. Sosioologi
5. Ilmu Politik
6. Ilmu Pemerintahan

Keberadaan Universitas Gadjah Mada dan khususnya Fakultas Sosial dan Politik perlu dilihat dari segi jaman yang melengkapi. Babah pengajaran berlangsung dalam interaksi yang intens dan saling mempengaruhi, antara pengajar dengan mahasiswa Belanda maupun siswa-siswi sekolah Belanda yang merupakan sebagian Mahasiswa CMA atau kepolisian dan Petugas (TP) yang berhasil menyelesaikan SMA sambil berjunggung dengan pengajar-pengajar yang sendiri para pengajar ne gara RI yang sarjana lulusan sekolah Belanda tetapi bersifat non-koperatif dengan Belanda. Kedua hal ini yang mengakibatkan terjadinya pembentukan fakultas baru pada tahun 1960-an, sejumalah pengajar ne gara itu masih dudung menjadi ke UGM Bang Hati saat itu Wakil Presiden, secara berkalai tetapi mengajar di lingkungan alih akara – Yogyakarta sampai pada akhirnya berhenti diri berusaha mengajar di UGM. Pada tahun 1962, dengan Keputusan Presiden nomor 107, pada akhirnya dilakukan dari pengajar-pengajar tuluh kemudian melanjutkan sebagai pengajar di UGM. Hampir semua pengajar yang menyebut diri berbagi jurusan dan fakultas di UGM dari tahun 50-an itu adalah bekas mahasiswa pejuang atau TP yang mendapat pendidikan linguistik di Bang Karto, Bung Hati, dan bangku.

Dari awal hendirinya Fakultas Sosial dan Politik bersama Fakultas Hukum, pengajaran diselenggarakan di Pagehuran dan 5 halang il, yaitu bangunan pusatuan utama Kraton Yogyakarta yang dipinjamkan oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Baru pada tahun 1973 Fakultas Sosial dan Politik pindah, meskipun gedungnya berada di satu kompleks yang dihubungkan UGM. Hampir semua pengajar yang menyebut diri berbagi jurusan dan fakultas di UGM dari tahun 50-an itu adalah bekas mahasiswa pejuang atau TP yang mendapat pendidikan linguistik di Bang Karto, Bung Hati, dan bangku.

Pada tahun 1982, dengan Keputusan Presiden no 107, nama Ilmu Publisistik dan Komunikasi Massa,

disinggung menjadi Ilmu Komunikasi. Dengan begitu jurusannya pada Fakultas Sosial dan Politik berubah menjadi:

1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Hubungan Internasional
3. Ilmu Komunikasi (menggantikan nama publisistik)
4. Sosioologi
5. Ilmu Politik
6. Ilmu Pemerintahan

Data kronik dapat menunjukkan perubahan-perubahan mencakup dari ilmu-ilmu yang diajarkan dan dikembangkan di Fakultas Sosial dan Politik. Tentu saja hal ini tidak se akhirnya berjelas perbedaan antara pengajar-masing ilmu, tetapi mungkin masih ada. Apakah perlu membahas *locus of interest*, stelah cukup diperlukan melihat perbedaan *focus of interest*-nya, merupakan tuntangan dalam mengisi bangunan epistemologis dari masing-masing pengajaran ilmu.

Saat itu, mula dari penciptaan Fakultas (Ilmu) Sosial dan (Ilmu) Politik secara formal pada pokok bahasan yang dibentuk oleh Prof. Dr. Soekarno dan Prof. Dr. S. D. R. Soegijapranata (SDR) pada bagian isi dapat mengenakan pertanyaan tentang normativitas dari ilmu-ilmu yang berada pada salah kategori indik: Sosial (interaksi sosial dalam konteks masyarakat/society) atau Politik (interaksi sosial dalam konteks negara/state). Pelajaran Sarjana Sosial untuk jurusan-jurusan Sosioologi dan Sosiologi atau Sarjana Politik untuk jurusan-jurusan Politik dan Ilmu Pemerintahan, Ilmu Internasional, dan Ilmu Peneritahan, dapat diandalkan menyelesaikan perbedaan di antara domain. Tetapi akan menyisakan pertanyaan untuk label Sarjana Ilmu Politik bagi lulusan jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi, hal ini belum benar-benar menjawab pertanyaan mengenai normativitas dan sentra *locus bagi proses mediated (komunikasi)* berlokasi pada *society dan state*? Penulis juga Ilmu

Konsepsi tidak dapat dipakai untuk hanya menempatkan *focus of interest*nya pada *locus* yang berkonteks saja.

Selanjutnya ini tidak ada maknanya atau tidak perlu diperlakukan, jika manfaat dari kegiatan penelitian ini tinggi dengan basis keliman dibutuh pada karakter substansial, ya itu kontribusi dalam pengembangan epistemologi yang ditunjukkan dengan domain teoritis yang disaku dan digunakan oleh ahli ilmu dalam penyelesaian masalah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai ilmu.

Karenanya tantangan bagi haluan dari masing-masing jurnal bukan dari label disampaikan oleh orator negara, tetapi dengan kesadaran epistemologis atas ilmu yang dikembangkan.

Pendidikan Ilmu Komunikasi di Universitas Gadjah Mada

Kronik

- 1964: Kehilangan perwanganapublisitas jabatan negara, Akademi Ilmu Politik
- 1950: Jurusan Publisitik, Bagian Sosial dan Politik, Fakultas Hukum, Sosial dan Politik (HSP)
- 1952: Jurusan Kemerayakan dan Publisitik, Bagian Sosial dan Politik, Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik (HESP)
- 1955: Jurusan Ilmu Publisitik, Fakultas Sosial dan Politik (Sospol)
- 1957: Jurusan Ilmu Publisitik, Fakultas Sosial dan Politik (Sospol)
- 1982: Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Ispo)

Orientasi pendidikan ilmu Komunikasi

Aspek pendidikan Komunikasi di Indonesia dapat diambil dari Akademi Ilmu Politik, yang menyatakan kegiatannya tinggi untuk jabatan negara dalam bidang perwanganapublisitas. Orientasi pengajaran dalam jabatan negara ini berlaku dengan dibentuknya jurusan Publisitik dan perubahan nama sebagai Ilmu Publisitik.

Dari namanya: publisitici (*publicicer*, Beharda = menggunakan) dan publisistik (*publicistic*, Jerman = perwanganapublisitik). Dalam pembelajaran dan pengajaran pada dasarnya bersifat pragmatis yaitu memberikan pengembangan tentang status publik.

Pada saat bermula publisitici/publisitik, paradigma dalam pendidikan ringgi adalah mencapai pengertian yang mendukung kegiatan publikasi dalam kehidupan polity yaitu untuk mempengaruhi publik agar sesuai dengan tujuan penyelenggara negara. Pada tahap ini keberadaan pendidikan tinggi adalah untuk menghasilkan ahli ilmu yang mampu memberikan solusi dalam kebutuhan publik. Kelebihan pendidikan tinggi ini adalah dalam sifat propaga dan ketekampilan publistas lainnya, dan *public opinion* dan pengertian sosial dan politik yang mendukungnya. Sayangnya tidak diketahui apakah pada masa awal jadi publisitici/publisistik karena salah satu faktor yang dapat diambil dari teori ini adalah gambaran pengaruh dan pengaruhnya terhadap pengaruh tentang publist di masa itu.²

Dengan selaras Ilmu Publisitik, seorang Jerman yang sangat setuju dengan pengertian tentang perwanganapublisitik adalah Jakob Octavius untuk lulus dari jurusan Ilmu Publisitik tahun 1962. Dari dirinya dan sikap lainnya diketahui bahwa perhatian diberikan kepada media dan jurnalistik dalam konteks negara.

² Skripsi "Octavia" yang dapat dilihat di antara lain diilah Jakob Octavius untuk lulus dari jurusan Ilmu Publisitik tahun 1962. Dari dirinya dan sikap lainnya diketahui bahwa perhatian diberikan kepada media dan jurnalistik dalam konteks negara.

Sejarah Ilmu Pubistik yang masih ke Indonesia perlu dibuktikan akaryanya, bermulanya dari tajuk sosial (termasuk sejarah sosio-sosiologi dan politik) terhadap media peri sebelum Perang Dunia II. Pendidikan dan kajian semacam ini terhenti saat berkurasaya pemerintahan Nazi, sebab ketidakpuasan penggunaan publikasi dan seluruh media massa berwiraku pada masa pemerintahan rezim Nazi Hitler. Sejaknya kajian akademis semacam kajian pemerintahan Hitler, hingga sekarang ini.

Runtuhnya rezim Hitler membebaskan kembang kajian pubistik dengan orientasi sebahagian, atau

sebagai kajian kelembutan yang bersifat objektif¹. Dari sini dapat dipahami penamaan jurusan ‘Kemasyarakatan dan Pubistik’ (1952 - 1957), yaitu mulai munculnya pemikiran dari Jerome yang ‘menentukan’ bahwa Publikasi adalah ‘media massa’ dan ‘publik’ yang bersifat objektif, dengan menggunakan pengertian kemasyarakatan sebagai konteks dalam mempelajari pubistik. Sampai pada puncahnya pengambilan alih sebuah Ilmu Pubistik untuk jurusan ‘Ilmu Gadjah Gadjah Mada’.

Dari sini mulai dikembangkan epistemologi, teori dan metodologi dalam publikasi di dalam kelembutan publik.

Pengembangan epistemologi, teori dan metodologi dalam publikasi di dalam kelembutan publik, yang dilepaskan dari koperasi pragmatik. Sering dengan perkembangan teknologi komunikasi yang membawa implikasi pada kerugian ikut perhatian bagi Ilmu Komunikasi. Jika sebelumnya

perhatian dan pengembangan teknologi komunikasi berada pada sektor industri massa dan sektor massa.

Sekelipan meriba wa konsekuensi dalam teori yang digunakan, sebab tidak semua media berkonkret pada *polylogy*².

Tarantang yang diberikan adalah kelembutan media dan konteksnya, pertama pertama tetapi tidak

media dengan basis jurnalistik (pers, radio, film dan televisi berita dokumenter dan berita, sain dan

medis) dan media yang sama untuk media lainnya dengan basis non-jurnalistik, seperti media sosial,

media film cerita basokop (*theatrical film*), televisi, dan lainnya. Kedua: konteks bukan hanya negara (*state*), sebab semakin menjajolnya peran pasar (*market capitalism*) industri sebagai konteks

kelembutan publik, dan ketiga: konteks bukan hanya sektor massa dan sektor massa, tetapi juga sektor massa dan sektor komersial. Tekanan dari pasar atau dunia industri menyebabkan perubahan besar pada konteks komunikasi.

Konteks komunikasi dalam karikulum. Jika sebelumnya pengembangan Ilmu Pubistik, misalnya

dicempakkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kini dikembangkan dalam konteks bisnis

komersial, sekaligus juga dengan pengembangan perspektif bisnis. Dengan berdasarkan pengembangan publikasi di dalam konteks bisnis, maka sekarang ini sebagian besar konten komunikasi semakin

yang dimanfaatkan media sebagai instrumen untuk mempengaruhi publik untuk kepentingan

komunikator. Dalam paradigma ini penekatan tetap bersifat positif atau *logiko-empricism*, dan di

dalarnya berkenaan teori-teori praktek seperti teori motif dan efek, nilai, stres, inovasi, jarangka

dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan media massa. Sedangkan konten pesan yang dimanfaatkan pesan dari bersifat linear ke pola *sharing* terhadap pesan, sedang di dalamnya perkembangan

pesan dengan jalur jalur komunikasi yang berkenaan dengan media massa, dan komunikasi pesan untuk politik dan bisnis-

industri. Terdapat dua faktor yang berkenaan dengan media massa dan media interaktif (*cyber*) yang

ditempatkan dalam 3 fokus yaitu media sosial, media massa konvensional dan media interaktif (*cyber*) yang

ditempatkan dalam 3 fokus yaitu jurnalistik, persusasi politik, dan persusasi bisnis. Untuk itu semua

disertai dengan pengembangan pendidikan seperti psikologi komunikasi komunikasi politik, dan

sesudahnya komunikasi.

¹ Lihat Ainus S. Susanto, (1974) *Kemunculan dalam Teori dan Praktik*, jilid I, Penerbit Binacipta, Bandung, b.vii.

Orientasi dari aliran Ilmu Komunikasi berpautan pada pragmatik di Indonesia dapat dilihat tidak semajuk sampai akhir '60-an, sejak penggunaan pengeluhan komunikasi sebagai instrumen dalam sistem negara. Perkenalan yang signifikan terjadi dengan perubahan konstansi politik dari Orde Lama ke Orde Baru. Rezim Orde Baru memberikan perintah untuk menghindari hal ini segera dilaksanakan terutama dengan mengambil posisi pada kasus Suharto dan Multi National Corporation (MNC). Komunikasi dalam model ini sekaligus membawa perangkat instrumen bisnis berupa komunikasi komersial. Proses industrialisasi berlangsung dalam media dengan perkenalan bangun industri periklanan di satu sisi dan media jurnalistik di sisi lain.

Indonesia sebagai negara berkembang resmi dengan sasaran konflik global dari masa perang dingin. Kecergasan pemerintahan Barat terutama Amerika Serikat bahwa negara-negara miskin yang dominasi oleh pemain ini dapat terasa ke bkk. Timur, telah menyebabkan adanya bebas-bebasan tahun 60-an sampai "70-an untuk pengabuan secara makro (macro level) dan mikro (individual) maya yang berakar pada ideologi dan teknologi modernisme dan liberalisme". Di Indonesia Orde Baru sebagai perifer dari kekuatan modal Barat, mengadakan percepatan akses ke pasar perbangunan, modernisasi atau industrialisasi. Untuk itu kajian-kajian dilakukan sebagai upaya untuk menjadikan komunikasi sebagai perangkat relasional sumber daya bagi bangsa yang berorientasi ke industri.

Sesuai dengan teori dan praktik pendidikan komunikasi dari Bremen dan Inggris pada awalnya, yaitu komunikasi pembangunan (*development communication*) dan komunikasi pendukung pembangunan (*development support communication*), yang diungkapkan oleh seorang ahli perbedaan orientasi dan teknologi komunikasi dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan dengan orientasi pada teknologi. Schlesinger, Ropponen, dan Tavel dalam bukunya *Globalization and Communication* menyatakan bahwa Amerika Serikat untuk pengembangan pengeluhan komunikasi yang dapat digunakan untuk menghalau mayarakat dalam model Barat.

Di Bremen sejak tahun '80-an melahirkan ketidak-pasaranan dalam pendidikan dan terhadap aliran pragmatik dalam Ilmu Komunikasi. Dalam konteks ini, aliran pragmatik dalam Ilmu Komunikasi berubahnya PD II

yang disusul dengan berdirinya pusat kajian komunikasi di Universitas Frankfurt, kemudian di Inggris berpusat di Universitas Birmingham. Secara sporaid, di Amerika Serikat berkembang juga aliran pragmatik.

Dari tini pendidikan Ilmu Komunikasi memperkenalkan *opisitologi* yang sama sekali berbeda dengan aliran wanita dan dengan orientasi pragmatik, yaitu melihat komunikasi sebagai produk dan pertukaran makna (*production and exchange meaning*). Di dalam aliran ini berkembang metode yang berfokus pada fenomenologi hermeneutik dan hermeneutika kritis. Pendekatannya komunikasi media (ekonomi massa) termasuk teknologi publik (kultural), dan berfokus dengan media berkebonik negara, pasar, atau mayarakat warga (*civil society*, globalitas atau lokalitas; dan lainnya).

Meskipun aliran ini tidak memperkenalkan prinsip-prinsip sebagaimana terjadi pada berkebangsaan pendidikan dan bahasan Ilmu Komunikasi dengan lulus media dalam konteks pasar pada tahun '70-an yang menyebabkan Presiden RI sampai menghukum keputusan untuk menyerangkan sebutan untuk pendidikan Ilmu Komunikasi. Dalam aliran "transmisii pesan" dalam pendidikan Ilmu Komunikasi ini berlangsung sesuatu ideologi pengeluhan sebagi ideologi dan protokol industrialisasi media. Tepat pada sisi lain, sejak tahun '80-an semakin banyak hasil kajian yang menggunakan aliran ini di jurusan Ilmu Komunikasi UGM.

Pembedaan kedua aliran dapat dilihat dari contoh pendidikan jurnalisme untuk tujuan pragmatik yaitu yang berbasis pada *newsworthiness* dan spek teknikalitas kinya, yang menjadi menjadi dasar

¹Lihat Daniel Dhabakar, (1991) *The State, the Rise of Capital and the Fall of Political Journalism, Political Economy of Indonesian News Industry*, Cornell University, Ithaca (disertasi PhD)

²Lihat Cheshire, C. (1990) *Media and the Politics of Coercion: Media Research & Psychological Warfare 1945-1980*, Oxford University Press, Oxford

³Lihat Aronowitz, S. (2001) *Communications Revolution: Critical Journeymen and the Future of Media*, The New Press, New York

dalam dunia media yang bersifat informal. Dalam aliran ini, pengembangan (praktis dan analitis) pragmatis diperbaiki dan peserta diskusi tidak canggung untuk memasuki bidang media dalam konteks negara, pasar, dan masyarakat. Keberhasilan pendidikan ilmu Komunikasi diilah dari parameter kapasitas adaptif peserta diskusi kepada media, dan daya serap media terhadap tulisan.

Tetapi pada sisi lain, jurnalistik perlu ditekankan sebagai sebuah kerja komunikasi yang memiliki karakteristik kultural. Jurnalisme merupakan sebuah kerja komunikasi yang dilakukan dalam perspektif kultural. Dengan demikian tujuan pengembangan ilmu Komunikasi adalah memberikan pengertian dengan epistemologi yang jelas dari fokus media bagi ilmuan. Sementara dalam aliran ini, pengembangan tentang fokus media dalam perspektif kultural akan menggariskan peserta diskusi sebagai media yang bersifat formal dan resmi. Oleh sebab itu, tujuan pengembangan ilmu Komunikasi ini memberikan kontribusi dalam ranah melekukur dengan analisis kritis dan makna kultural dari media dalam konteks negara, pasar dan masyarakat.

Sebagai penutup, dua orientasi pendekatan pada praktis publisistik dapat disebutkan, dari 2 sisi pertama, akibat takluknya ilmu keberhasilan pendidikan dan penelitian dan kedua, akibat perubahan mode komunikasi dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama biasa disebut sebagai politik pendidikan berdasarkan orientasi negara yang mencakupkan orientasi institusional guna mendapatkan keharusan yang bersifat formal dan resmi. Sedangkan yang kedua, merupakan akibat perkembangan teknologi, sedang yang ketiga, menyangkut perkembangan epistemologi, melahirkan respon dengan pilihan-pilihan komunitas berfikir pada fenomena medias dalam kehidupan manusia, misal media komunikasi komersional hingga media massa (mass communication).

Untuk mengakhiri dimaksudkan untuk bahwa perubahan dimaksimasi dari sisi pertama, untuk metamorfosis Ilmu Publisistik Komunikasi dapat diilah dengan aman sebagai berikut:

pertama: pengembangan praktis publisistik untuk kegiatan pemerintahan (1946 – 1952);

kedua: pengembangan kemasyarakatan untuk kegiatan publisistik dalam konteks negara (1952 – 1957);

ketiga: epistemologi publisistik untuk media massa dalam konteks negara (1957 – akhir 60-an);

keempat: pengembangan teknologi dan penelitian dalam konteks negara (1970 – 90an);

lima: pengembangan praktis publisistik untuk pendidikan tinggi di Indonesia (1982 – sejauh ini).